

2.3

BIDANG ILMU :
AKUNTANSI KEUANGAN

LAPORAN AKHIR
KEGIATAN PENELITIAN



ANALISIS DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT DALAM
KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN PENGUNGKAPAN
SUKARELA (*VOLUNTARY DISCLOSURE*)

PENELITI

Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt (197909242008122003)

Dibiayai oleh Dana DIPA dari Sumber PNB
Tahun Anggaran 2011

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN DIPA PNBP FEB UNDIP

- | | | | |
|--------|----|---------------------------------|--|
| 1. | a. | Judul Penelitian | : Analisis Dewan Komisaris, Komite Audit dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Pengungkapan Sukarela (<i>Voluntary Disclosure</i>). |
| | b. | Jurusan | : Akuntansi |
| | c. | Bidang Ilmu/Konsentrasi | : Akuntansi Keuangan |
| 2. | | Ketua Penelitian | |
| | a. | Nama Lengkap dan Gelar | : Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt |
| | b. | Jenis Kelamin | : Perempuan |
| | c. | Golongan/Pangkat/NIP | : IIB/Pengajar/197909242008122003 |
| | d. | Jabatan Fungsional | : - |
| | e. | Jabatan Struktural | : - |
| | f. | Fakultas/Jurusan | : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi |
| 3. | | Alamat Ketua Peneliti | |
| | a. | Alamat kantor/Telp/Fax/A-mail | : Jl Prof. Soedharto |
| | b. | Alamat rumah/Telp/Fax/A-mail | : Jl. Gondang Barat I/No 1 |
| 4. | | Lokasi Penelitian | : Indonesia |
| 5. | | Kerjasama dengan institusi lain | : -..... |
| | a. | Nama Institusi | : -..... |
| | b. | Alamat | : -..... |
| | c. | Telepon/Fax/E-mail | : -..... |
| 6. | | Lama Penelitian | : 4 bulan |
| 7. | | Biaya yang diperlukan | : |
| | a. | DIPA FEB UNDIP | : Rp. 5.000.000,- |
| Jumlah | | | : Rp. 5.000.000,- |

(Lima Juta Rupiah)

Mengetahui ;

Ketua Jurusan Akuntansi



Prof. Dr. H.M. Syafruddin, M.Si., Akt
NIP 19620416 198803 1003

Semarang, September 2011

Ketua Peneliti,



Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt
NIP. 19790924 2008122003



Menyetujui
Ketua FEB UNDIP

Prof. Dr. Muhammad Nasir, M.Si, Ph.D, Akt
NIP. 19600627 199001 1001

RINGKASAN

Penelitian yang akan dilakukan menguji interaksi antara tata kelola (*governance*) dan pengungkapan sukarela dalam *setting* keagenan dengan kepemilikan terkonsentrasi dan representasi pemegang saham *insider* di dewan perusahaan. Dalam konteks ini, konflik keagenan terjadi antara pemegang saham pengendali *insider* dan investor *outsider* minoritas. Pemegang saham *insider* yang lebih besar dapat memanfaatkan keuntungan pengawasan privat, memiliki akses langsung ke informasi sehingga dapat merugikan pemegang saham *outsider*. Untuk menjamin adanya tata kelola perusahaan yang baik diperlukan kegiatan monitoring dewan komisaris dan pengungkapan (M.Allegriani dan G.Greco,2011).

Analisis hubungan antara tata kelola dan pengungkapan sukarela melibatkan 5 variabel tata kelola perusahaan. Variabel tersebut adalah Komposisi Dewan Perusahaan (IND), Ukuran Dewan Perusahaan (BOARDSIZE), Komite Audit, Komite kompensasi dan nominasi, mayoritas dilakukan oleh direksi independen (INDEPCOM), Aktifitas Dewan Komisaris dan Aktifitas Komite Audit. Selanjutnya akan dilakukan analisis regresi antara pengungkapan sukarela dan 5 variabel tata kelola perusahaan. Selain itu juga diregresikan sub kategori yang terkait dengan variabel tata kelola perusahaan. Data penelitian bersumber dari laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2009 yang *listed* di Bursa Efek Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi dan ketekunan (*diligence*) berhubungan positif dengan pengungkapan sukarela frekuensi pertemuan audit juga menunjukkan pengaruh positif terhadap jumlah informasi sukarela yang diungkapkan. Secara keseluruhan penelitian ini konsisten dengan teori agensi, yaitu terdapat hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan. Hasil penelitian mendukung pandangan adanya alat kontrol dapat mengurangi insentif pemegang saham mayoritas untuk mengontrol pemegang saham lainnya. Selanjutnya penelitian ini juga dapat mendorong pemerintah untuk memperluas pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

PRAKATA

Puji Syukur kepada Allah SWT laporan penelitian dengan tema Analisis Dewan Komisaris, Komite Audit dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Pengungkapan Sukarela (*Voluntary Disclosure*) dapat disusun. Penelitian ini dibiayai oleh dana DIPA FEB UNDIP dari sumber PNBP Tahun Anggaran 2011. Penelitian ini juga melibatkan mahasiswa untuk melatih mereka dalam bidang penelitian.

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan menambah bahan kajian ilmu akuntansi keuangan, khususnya tema tentang pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Peneliti ingin menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan dalam penyelesaian penelitian kepada Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang memberikan fasilitas dana penelitian serta administrasi terkait dengan hubungan pihak terkait di luar UNDIP.

Akhirnya peneliti berharap bahwa penelitian ini akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu dan informasi konsentrasi akuntansi keuangan. Peneliti juga menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan akhir penelitian ini. Oleh karena itu peneliti mengharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan penelitian lebih lanjut.

Semarang, September 2011



Aditya Septiani, S.E., M.Si, Akt

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	4
2.2 Pengembangan Hipotesis	6
2.2.1 Proporsi Direktur Independen	6
2.2.2 Jumlah Dewan komisaris	7
2.2.3 Komite Dewan komisaris	8
2.2.4 Ketekunan (<i>diligence</i>) Dewan komisaris dan Komite Audit	9
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
3.1 Tujuan Penelitian	11
3.2 Manfaat Penelitian	11
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Penentuan Sampel Penelitian dan Sumber Data	12
4.2 Variabel Dependen	13
4.3 Variabel Independen	16
4.4 Variabel Kontrol	17
4.5 Entry dan Pengolahan Data	17
4.6 Analisis data dan Pembuatan Laporan Penelitian	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Analisis Statistik Deskripif	19
5.2 Analisis Multivariat	20
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	23
6.2 Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	25
LAMPIRAN	
CV PENELITI	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	19
Tabel 5.2. Hasil Regresi OLS	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1

Halaman
12

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I CV PENELITI
LAMPIRAN II LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola perusahaan dan Disclosure telah dipertimbangkan oleh regulator pasar dan pihak yang berwenang sebagai dua instrumen yang tak terpisahkan untuk proteksi bagi investor pada pasar modal (Cadbury Committee Report,1992;Blue Ribbon Report,1999;OECD,1999).

Perusahaan dengan *agency cost* yang tinggi akan berusaha menurunkan kos tersebut dengan mekanisme kontrol seperti monitoring aktivitas, struktur tata kelola perusahaan, dan pengungkapan sukarela (Jensen dan Meckling, 1976;leftwich, 1981;Fama dan Jensen,1983). Studi pustaka menunjukkan bahwa ada hipotesis hubungan substitusi antara *governance* dan *disclosure*. Pengungkapan (*Disclosure*) membutuhkan kos yang tinggi, sehingga perusahaan mungkin memilih untuk memperkuat mekanisme internal tata kelola perusahaan daripada meningkatkan level pengungkapan (Cheng dan Courtenay,2006;Cerbioni dan Parbonetti,2007).

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang terdiri dari serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. Selain itu, tata kelola perusahaan juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan tujuan dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik *monitoring* kinerja.

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme *monitoring* yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (Jensen dan Meckling,1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh'd et al (1998) dalam Pratana dan Mas'ud (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memantau agen dengan kepemilikan yang besar. Ketiga melalui peran dewan komisaris (*board of directors*). Dechow et al.(1996) dan Beasley (1996) menemukan korelasi yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan

pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan keuangan.

Adanya kepentingan melindungi pemegang saham luar untuk pengembangan pasar keuangan tidak dapat berjalan efektif. Pemegang saham dominan mungkin berusaha untuk memaksimalkan utilitas dan kekayaan mereka sendiri serta mengambil alih hak dari investor lainnya serta pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan (Shleifer dan Vishny,1997). Mereka juga cenderung mengabaikan investasi yang menguntungkan demi manfaat privat (Shleifer dan Wolfeson, 2002). Sedangkan pemegang saham *insider* yang lebih besar dapat memanfaatkan keuntungan pengawasan privat, memiliki akses langsung ke informasi. Di lain pihak, pemegang saham luar bergantung pada kegiatan monitoring dan pengungkapan (M.Allegrini dan G.Greco,2011).

Peran direktur independen tampaknya penting untuk menjamin kepentingan investor pihak luar. Ancaman untuk efektifitas direktur independen dalam monitoring kegiatan adalah bahwa keberadaan dewan komisaris yang berjumlah besar sebagai pemegang saham pengendali dan pemimpin yang kuat dapat menyebabkan bias dalam proses nominasi. (Jensen, 1993; Vafeas 1999b; Shivdasani dan Yermack, 1999).

Pengungkapan sukarela mungkin dapat menjadi alat untuk memoderasi asimetri informasi antar pemegang saham. Karena *disclosure* merupakan produk dari keputusan manajemen (Meek,1995;Healy dan Palepu,2001), maka penelitian tentang peranan dewan komisaris, komite audit, dalam menentukan perilaku “disclosure” perusahaan sangat penting untuk dilakukan. Tingkat Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) diukur dengan indeks pengungkapan sukarela. Indeks tersebut tersebut telah diuji validitas indeks dalam menggambarkan tingkat pengungkapan sukarela. Validitas index didukung oleh(1) uji reliabilitas *inter coder*, dilakukan dengan Krippendorf's alpha; (2) skor audit oleh para peneliti yang berbeda; (3) konsistensi internal antara komponen indeks, diukur dengan koefisien Cronbach alpha; (4) korelasi dengan beberapa variabel penjelas secara konsisten.

Dalam penelitian ini akan dieksplorasi interaksi antara tata kelola dan pengungkapan dalam *setting* keagenan yang ditandai dengan adanya pemegang saham pengendali sehingga menunjukkan dewan kepemimpinan yang kuat. Tingkat pengungkapan sukarela akan diukur

dengan indeks pengungkapan sukarela. Analisis hubungan antara tata kelola dan pengungkapan sukarela melibatkan 5 variabel tata kelola perusahaan. Variabel tersebut adalah Komposisi Dewan komisaris (IND), Ukuran Dewan komisaris (BOARDSIZE), Komite Audit, Komite kompensasi dan nominasi, mayoritas dilakukan oleh direksi independen(INDEPCOM), Aktifitas Dewan komisaris dan Aktifitas Komite Audit. Selanjutnya akan dilakukan analisis regresi antara pengungkapan sukarela dan 5 variabel tata kelola perusahaan. Selain itu juga diregresikan sub kategori yang terkait dengan variabel tata kelola perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela

Teori agensi menyajikan suatu kerangka teori untuk mempelajari hubungan tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela karena keduanya merupakan mekanisme kontrol. Melalui teori agensi tersebut telah menimbulkan banyak pemikiran untuk meneliti tentang konflik kepentingan, masalah insentif dan mekanisme kontrol tata kelola perusahaan.

Pemisahan Kepemilikan dan Kontrol Perusahaan menimbulkan asimetri informasi dan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976; Fama 1980). Oleh karena itu, keberadaan pemegang saham dalam dewan sebagai direktur eksekutif (kebanyakan) dan non-eksekutif diharapkan ketika kepemilikan terkonsentrasi di tangan pemegang saham dominan (Shleifer dan Vishny 1997).

Pemegang saham *insider* melakukan pengawasan langsung tentang manajemen atau manajer sendiri, sering memimpin dewan sebagai direksi dan CEO. Hal ini memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan kepemilikan dan manajemen. Namun demikian, konflik kepentingan keagenan akan muncul. Pemegang saham dominan mewakili kepentingan mereka sendiri, yang mungkin tidak selaras dengan kepentingan investor minoritas. Oleh karena itu pemegang saham dominan dapat mencoba untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kekayaan dengan mengambil alih hak *stakeholder*, yaitu karyawan (Fama dan Jensen 1983; Shleifer dan Vishny 1997; Dyck dan Zingales 2004).

Beberapa studi mengenai masalah keagenan (Claessens et al. 1999; DeAngelo dan DeAngelo 2000; Faccio et al. 2001; Anderson dan Reeb 2004). Faccio et al. (2001) ditemukan bukti empiris dari pengambilalihan kekayaan oleh pemegang saham pengendali, berkaitan dengan kebijakan dividen.

Tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela adalah dua mekanisme kontrol yang digunakan untuk melindungi investor dan mengurangi konflik keagenan. Secara teori, hubungan keduanya dapat saling melengkapi atau substitusi. Kegiatan *monitoring* mengurangi perilaku oportunistik manajemen dan asimetri informasi. Dalam lingkungan *monitoring* yang intensif, manajer tidak mungkin menahan informasi untuk manfaat pribadi, dengan peningkatan kemungkinan kelengkapan pengungkapan dan kualitas. Jika hubungan tersebut substitusi, pemerintahan dan pengungkapan digunakan sebagai mekanisme kontrol alternatif untuk mengurangi konflik keagenan. Perusahaan strategis akan memilih antara perangkat kontrol alternatif (Rediker dan Seth 1995; Cheng dan Courtenay 2006). Pengungkapan sukarela bukanlah tanpa biaya. Perusahaan yang bersedia untuk mengurangi asimetri informasi melalui pengungkapan mungkin akan mengeluarkan banyak biaya (Verrecchia 1983; Darrough dan Stoughton 1990). Biaya tersebut terkait dengan biaya litigasi (Healy dan Palepu, 2001) dan biaya yang berkaitan dengan kerugian potensial atas pembiayaan yang telah ada yaitu dengan bank (Rajan dan Zingales 1998; Leuz dan Oberholzer- Gee 2006; Leuz dan 2008 Wysocki).

Konflik agensi dan asimetri informasi dapat dikurangi melalui tata kelola internal perusahaan yang efektif, maka mekanisme kontrol tidak perlu ditingkatkan seperti pada pengungkapan sukarela, sehingga biaya pengungkapan relevan dapat dikurangi (Leftwich et al 1981; Cerbioni dan Parbonetti 2007).

Teori agensi berdasarkan literatur empiris menyatakan adanya hubungan substitusi dan pelengkap antara *governance* dan pengungkapan. Dalam konteks teori agensi penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen (Chen dan Jaggi 2000; Ho dan Wong 2001; Cheng dan Courtenay 2006; Eng dan Mak 2003; Gul dan Leung 2004; Cerbioni dan Parbonetti 2007). Dalam suatu *setting* keagenan terkait dengan konsentrasi kepemilikan, pemegang saham *insider* mayoritas mengambil manfaat atas adanya pengendalian privat dan memanfaatkan kemampuan akses informasi secara langsung. (Shleifer dan Vishny 1997; Dyck dan Zingales 2004). Dalam situasi ini, investor pihak luar mengandalkan pada mekanisme tata kelola internal perusahaan dan pada pengungkapan untuk melindungi kepentingannya.

Pemegang saham *insider* mengatur proses nominasi, memilih direktur independen di bawah pengaruh mereka untuk membatasi intensitas *monitoring* (Jensen 1993; Vafeas 1999a; Shivdasani dan Yermack 1999). Selain itu, pemimpin dewan dapat mengatur anggota dewan dan agenda komite, mempengaruhi keputusan pengendalian aktivitas (Carcello et al 2002; Laksamana 2008). Hal tersebut adalah suatu peringatan bahwa para pemegang saham luar dapat berperan dalam melindungi hak mereka terhadap pengaruh dan kuasa pemegang saham pengendali mayoritas (Anderson dan Reeb 2004). Dalam situasi ini timbul kesulitan untuk mengurangi konflik keagenan hanya dengan kontribusi perangkat pengendalian internal seperti . Oleh sebab itu diperlukan suatu mekanisme eksternal seperti pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*).

Konflik agensi antara pemegang saham pengendali mayoritas dan pihak pemegang saham minoritas dapat dikurangi dengan adanya direktur independen pemegang saham (Anderson dan Reeb 2004; Park dan Shin 2004 ;Patelli ;dan Prencipe,2007). Literatur empiris menemukan bukti bahwa direktur independen bertindak mengurangi konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas (Anderson dan Reeb, 2004). Gul dan Leung (2004) menyatakan bahwa ada asosiasi negatif antara dewan pimpinan dan pengungkapan sukarela. Hal tersebut diatasi dengan adanya direksi dari pihak luar.

Beberapa penelitian empiris telah mempelajari hubungan antara komposisi dewan dan pengungkapan sukarela. Hasil penelitian memberikan hasil yang beragam. Beberapa penelitian hubungan komplementer antara komposisi dewan, diukur dengan persentase direktur independen pada dewan komisaris, dan pengungkapan sukarela (Lim et al 2007.; Cheng dan Courtenay 2006; Patelli dan Prencipe 2007). Penelitian yang dilakukan pada negara-negara Asia memberikan hasil bahwa adanya proporsi direktur independen yang lebih besar di dewan maka akan menurunkan tingkat pengungkapan sukarela (Eng dan Mak 2003; Gul dan Leung 2004).

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Proporsi Direktur Independen

Penelitian empiris telah mempelajari hubungan antara komposisi dewan dan pengungkapan sukarela. Hasil penelitian memberikan hasil yang beragam. Beberapa penelitian

hubungan yang melingkupi antara komposisi dewan, diukur dengan persentase direktur independen pada dewan komisaris, dan pengungkapan sukarela (Lim et al 2007.; Cheng dan Courtenay 2006; Patelli dan Prencipe 2007). Penelitian yang dilakukan pada negara-negara Asia memberikan bukti bahwa proporsi yang lebih tinggi dari direktur independen di dewan maka akan menurunkan tingkat pengungkapan sukarela (Eng dan Mak 2003; Gul dan Leung 2004, M. Allegrini dan G., Greco, 2011) Insentif para direktur independen untuk mendukung pengungkapan sukarela dengan adanya pemegang saham pengendali dapat dikaitkan dengan: (1) sinyal adanya kolusi dengan pemegang saham pengendali dan pemimpin dewan ; (2) mendorong nilai pasar. Hasil yang diharapkan adalah representasi direktur independen dalam dewan secara positif berkaitan dengan tingkat pengungkapan informasi sukarela. Maka dari itu, hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

HP1 :Ceteris paribus, terdapat korelasi positif antara proporsi direktur independen di dewan komisaris dan tingkat pengungkapan sukarela.

2.2.2 Jumlah Dewan komisaris

Salah satu faktor penting yang dianggap dapat mempengaruhi efektivitas dewan adalah ukuran. Berbagai literatur menunjukkan bahwa dewan yang berjumlah banyak kurang efektif dibandingkan dewan yang berjumlah sedikit dalam mengurangi konflik keagenan.

Dewan komisaris yang berjumlah banyak mempunyai manfaat yaitu kapasitas monitoring meningkat, namun demikian masalah juga akan timbul yaitu : koordinasi dan pengambilan keputusan lambat (Lipton dan Lorsch 1992, hal 66). Selain itu, dewan komisaris yang berjumlah besar memudahkan CEO untuk melakukan pengendalian (Jensen 1993, hal 863). Hal tersebut didukung oleh penelitian Yermack (1996) yang menghasikan adanya pengaruh ukuran dewan komisaris pada nilai perusahaan. Masalah penelitian terkini melihat bahwa dewan komisaris yang jumlahnya lebih besar dapat mengurangi keefektifan dewan dan bagi pemegang saham(Coles et al 2008;. Di Pietra et al 2008; Lynck et al. 2008; Larmou dan Vafeas 2010). Dominasi dewan komisaris oleh eksekutif dan *insiders* dapat menghambat aktivitas komite audit independen (Klein,1998; Mendez dan Garcia 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Coles ,2008 menemukan bahwa perusahaan besar dan beragam cenderung menempatkan lebih banyak direksi di dewan komisarisnya, baik untuk

fungsi *monitoring* dan memberikan saran atas tujuan perusahaan. Lynck (2008) menyatakan bahwa struktur dewan di seluruh perusahaan adalah konsisten dengan biaya dan manfaat dari peran *monitoring* dewan. Dewan komisaris yang independen lebih diutamakan untuk struktur tata kelola yang baik. M.Allegrini dan G.Greco (2011) membuktikan bahwa representasi pemegang saham *insider* di dewan komisaris berhubungan dengan semakin rendahnya independensi dewan komisaris. Hasil penelitian konsisten dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial dan *monitoring* dewan komisaris adalah mekanisme tata kelola substitusi. Hal tersebut dapat merugikan pemegang saham *outsider*.

Konsentrasi pemilikan dan representasi pemegang saham *insider* yang tinggi dapat mengurangi tingkat keefektifan struktur tata kelola perusahaan (Petra et al,2008). Jumlah dewan komisaris yang lebih besar dapat memberikan lebih banyak pengetahuan, kepakaran, kapasitas *monitoring* dan berbagi beban kerja (Larmou dan Vafeas, 2010). Dewan komisaris yang jumlahnya besar dapat memberikan kontribusi lebih banyak untuk mengurangi konflik distribusional antara pemegang saham *insider* dan pemegang saham *outsider* minoritas.

Ukuran dewan komisaris dapat memberi kontribusi pada keefektifan dewan komisaris, karena pemegang saham pengendali yang besar. Cerbioni dan Parbonetti (2007) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif dengan sumber daya manusia dan informasi eksternal tentang *intellectual capital*. Sementara itu, ukuran dewan komisaris berhubungan negatif dengan pengungkapan *intellectual capital* internal. Penelitian yang dilakukan Akhtarudin,2009 menghasilkan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dan dan pengungkapan informasi sukarela, maka dari itu hipotesis dapat disusun sebagai berikut :

HP2 : Ceteris Paribus, Terdapat hubungan positif antara ukuran perusahaan dan tingkat pengungkapan sukarela.

2.2.3 Komite Dewan komisaris

Adanya komite nominasi diantara pemegang saham, dapat berperan penting karena komite ini dapat memberikan kemungkinan kepada pemegang saham minoritas untuk mendukung calon direktur independen (Jensen,1993; Shivdasani dan Yermack,1999). Menurut Vafea, 1999, Keberadaan komite nominasi dapat memberikan kontribusi sebagai alat *monitoring* terhadap efektivitas dewan komisaris. Komite kompensasi juga dapat memberikan kontribusi

terhadap tata kelola perusahaan, dan berperan positif terhadap pengendalian manajemen puncak (*top management control*). Komite ini dapat berkontribusi untuk menentukan mekanisme remunerasi dan menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham (Main dan Johnston, 1993; Conyon dan Peck, 1998; Laksmana, 2008).

Komite audit mempunyai peranan utama dalam aktivitas *monitoring* dewan komisaris diperankan oleh (Blue Ribbon Report, 1999). Dengan memastikan bahwa pengungkapan objektif, komite audit akan memberikan penilaian yang akurat tentang keputusan dan kinerja manajemen puncak. Dominasi dewan komisaris oleh eksekutif dan *insiders* dapat menghambat aktivitas komite audit independen (Klein, 1998; Mendez dan Garcia 2007).

Penelitian empiris menghasilkan bahwa keberadaan audit, kompensasi dan komite pemilihan dalam dewan komisaris berpengaruh pada pengungkapan (Cerbioni Parbonetti 2007; O'Sullivan et al. 2008). Oleh karena itu, dapat dihipotesiskan bahwa :

HP3 : *Ceteris Paribus*, ada korelasi positif antara keberadaan komite audit, komite kompensasi dan nominasi yang mayoritas terdiri dari direktur independen dan tingkat pengungkapan sukarela.

2.2.4 Ketekunan (*diligence*) Dewan komisaris dan Komite Audit

Studi pustaka menjelaskan bahwa aktivitas pemantauan direksi dalam hal pengungkapan (*disclosure*) diprosikan pada jumlah pertemuan (*meeting*). Penelitian yang dilakukan Laksamana (2008) menghasilkan bahwa frekuensi pertemuan (*meeting*) berkorelasi positif dengan tingkat pengungkapan yang lebih tinggi terkait dengan praktek kompensasi eksekutif. Selain itu, frekuensi pertemuan komite audit berkorelasi positif dengan kemungkinan pengungkapan *earning forecast* (Karamanou dan Vafeas, 2005). Terkait dengan kualitas audit, hal tersebut juga diukur dengan adanya frekuensi pertemuan komite audit.

Frekuensi pertemuan audit berhubungan dengan keputusan untuk mengungkapkan informasi masa depan dalam laporan tahunan (O'Sullivan, 2008). Hipotesis terkait ketekunan (*diligence*) dewan komisaris dan komite audit dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut :

HP4a : *Ceteris Paribus*, terdapat korelasi positif antara jumlah pertemuan dewan komisaris dan tingkat pengungkapan sukarela.

HP4b : Ceteris Paribus, terdapat korelasi positif antara jumlah pertemuan komite audit dan tingkat pengungkapan sukarela.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi interaksi antara tata kelola dan pengungkapan dalam *setting* keagenan yang ditandai dengan pengungkapan sukarela. adanya pemegang saham pengendali sehingga menunjukkan dewan kepemimpinan yang kuat. Tingkat pengungkapan sukarela akan diukur dengan indeks pengungkapan sukarela. Analisis hubungan antara tata kelola dan pengungkapan sukarela melibatkan 5 variabel tata kelola perusahaan. Variabel tersebut adalah Komposisi Dewan komisaris (IND), Jumlah Dewan komisaris (BOARDSIZE), Komite Audit, Komite kompensasi dan nominasi, mayoritas dilakukan oleh direksi independen(INDEPCOM), Aktifitas Dewan komisaris (BOARDMEET) dan Aktifitas Komite Audit (ACMEET).

Tujuan Penelitian ini adalah memberi gambaran tentang praktik pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) yang dilaksanakan oleh perusahaan manufaktur di Indonesia dan sejauhmana dewan komisaris, komite audit berdampak pada luasnya pengungkapan sukarela.

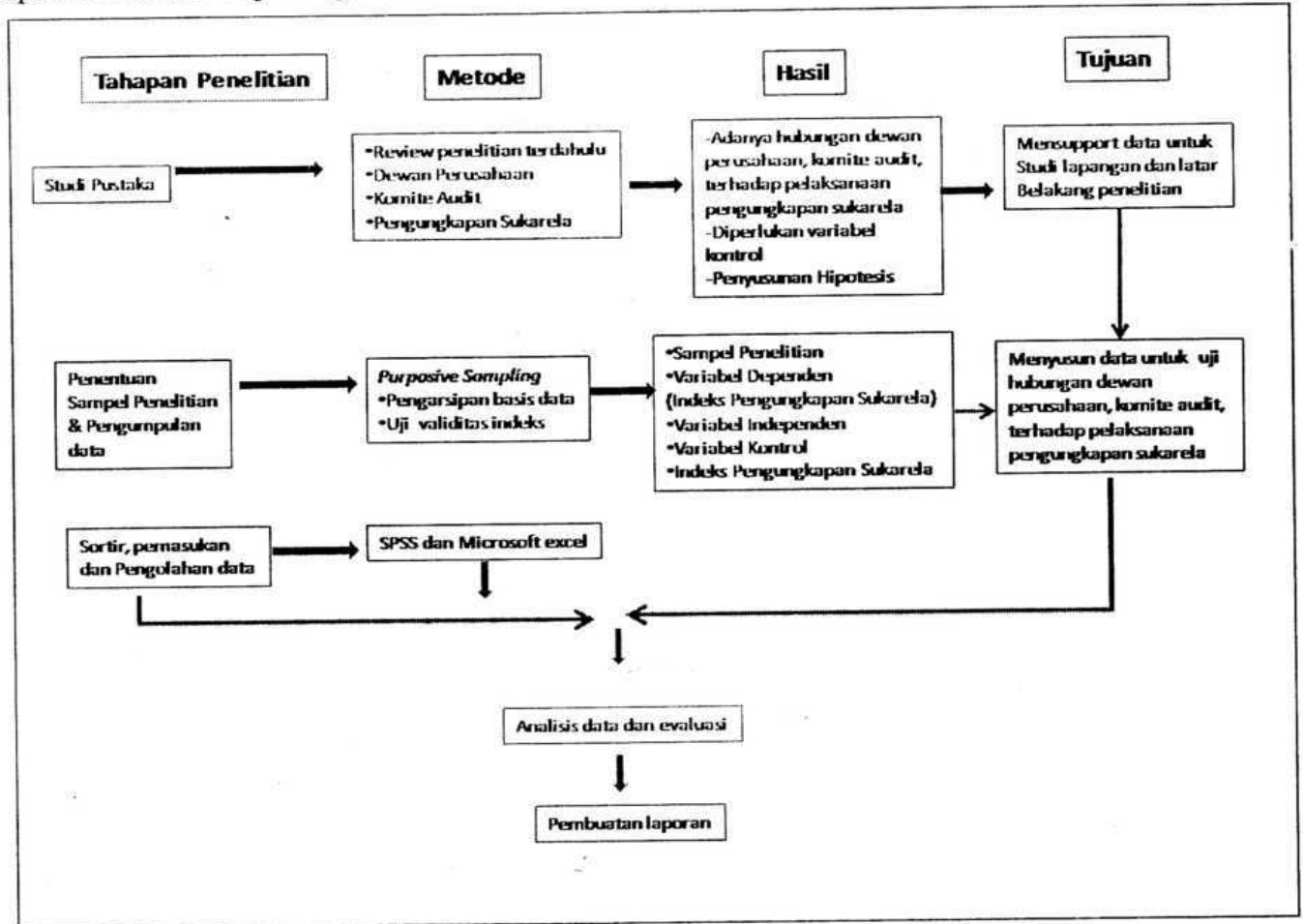
3.2 Manfaat Penelitian

Kajian Penelitian diharapkan memberikan manfaat :

1. Penelitian dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara mekanisme kontrol yang berbeda dalam setting keagenan dengan karakteristik adanya pemegang saham mayoritas.
2. Hasil penelitian berguna bagi pembuat kebijakan dan peraturan. Hasil tersebut dapat mendukung pernyataan untuk memperluas persyaratan pengungkapan. Setelah memperluas pengungkapan, kemungkinan untuk mengambil keuntungan privat pemegang saham mayoritas dapat dibatasi sehingga konflik keagenan dan asimetri informasi akan berkurang.

BAB IV METODE PENELITIAN

Tahapan Penelitian dapat digambarkan dalam Gambar 4.1



Gambar 4.1. Tahapan Penelitian

4.1 Penentuan Sampel Penelitian dan Sumber Data

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian dilakukan pada perusahaan non keuangan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Dalam penelitian ini tidak memasukkan perusahaan keuangan karena perusahaan tersebut mempunyai persyaratan pelaporan yang spesifik. Tahun penelitian dimulai tahun 2009 karena adanya revisi Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) pada tahun 2006. Sumber data penelitian didapatkan dari laporan tahunan yang diunduh dari *website* Bursa Efek Indonesia dan *website* perusahaan sampel penelitian.

4.2 Variabel Dependen

Tingkat pengungkapan sukarela diukur dengan menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang didasarkan pada informasi yang diungkapkan pada laporan tahunan tahun 2007 – 2010 (Cooke 1989a; Marston dan Shrives 1991; Botosan 1997). Penelitian empiris sebelumnya keseluruhan tingkat pengungkapan sukarela oleh perusahaan diprosikan dengan perkiraan pendapatan (Ajinkya 2005; Karamanou dan Vafeas,2005). Selain itu penelitian terdahulu menggunakan proksi pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan (Botosan1997; Ho dan Wong 2001; Eng dan Mak 2003; Gul dan Leung 2004; Cheng dan Courtenay 2006).

Pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan dapat memberikan proxy yang baik untuk keseluruhan tingkat informasi sukarela yang diungkapkan (Botosan,1997). Penelitian yang akan dilakukan, menggunakan indeks pengungkapan sukarela yang disusun oleh M Allegrini dan G.Greco,2010. Indeks tersebut tersebut telah diuji validitas indeks dalam menggambarkan tingkat pengungkapan sukarela. Validitas index didukung oleh(1) uji reliabilitas *inter coder*, dilakukan dengan Krippendorf's alpha; (2) skor audit oleh para peneliti yang berbeda; (3) konsistensi internal antara komponen indeks, diukur dengan koefisien Cronbach alpha; (4) korelasi dengan beberapa variabel penjelas secara konsisten. Sub-skor dihitung sebagai rasio dari jumlah item yang diungkapkan dengan maksimum skor yang dapat diperoleh. Selanjutnya skor tersebut dipergunakan sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Berikut ini adalah indeks pengungkapan sukarela yang akan dipergunakan dalam penelitian ini :

Financial information

1. Profitability ratios
2. Financial structure ratios
3. Liquidity ratios
4. Cash flow ratios
5. Other ratios (i.e. productivity ones)
6. Operating working capital and/or needs of operating working capital
7. EBITDA
8. Free cash flow from operations
9. Change in sales
10. Change in operating income

1. Change in net income
2. Change in R&D expenditures
3. Organic growth
4. EVA_ and/or residual income measure
5. WACC

rojected information

6. A comparison of previous earnings projection to actual earnings
7. A comparison of previous sales projection to actual sales
8. A forecast of market share (quantitative)
9. A cash flow projection (quantitative)
10. A projection of future capital expenditure (quantitative)
11. A projection of future R&D expenditures (quantitative)
12. A projection of future earnings (quantitative)
13. A projection of future sales (quantitative)

Capital market data

14. Share price trend
15. Comments on the firm's share price evolution (qualitative)
16. Comparison between the firm's share price evolution and the evolution of

Market indices

17. Evolution of the volume of transactions
18. Market capitalization

Strategic information

29. A statement of corporate goals or objectives
30. A general statement of corporate strategy
31. Actions taken during the year to achieve the corporate goals
32. Information about mergers and acquisitions
33. Macro-economic scenario discussed
34. Competitive environment discussed
35. Regulation and legislation affecting business discussed
36. Analysis of the competitors
37. Distribution of the customers (by type or by geographic area)

38. Description of the brands/trademarks
39. Quantitative and non-financial information about production or sales (for example, number of tons produced)
40. The management organization chart

Risk information

41. Information about the firm's risk management system
42. Information about risks related to the macro-economic scenario
43. Information about risks related to the competitive environment
44. Information about risks related to customers
45. Information about risks related to production/logistics
46. Information about risks related to human resources/relationship with trade unions
47. Information about risks related to IT/information systems/data security
48. Information about risks related to frauds/crimes committed by employees
49. Information about risks related to the company's reputation
50. Information about risks related to reporting
51. Information about risks related to legal compliance with labour laws and regulations (i.e. regulations about security issues)
52. Information about risks related to the compliance with industry/antitrust regulations
53. Information about risks related to the impact of the firm's operations on the natural environment

Sustainability information

54. A brief history of the company
55. Description of employees policy
56. Information about social sustainability policies
57. Social sustainability performance indicators
58. Stakeholders map
59. Information about environmental sustainability policies
60. Environmental sustainability performance indicators

4.3 Variabel Independen

Data terkait dengan variabel independen tata kelola perusahaan dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan. Berikut ini adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.3.1 Komposisi Dewan komisaris (IND)

Komposisi dewan komisaris diukur dengan proporsi direksi independen dengan jumlah keseluruhan direksi.

3.3.2 Ukuran Dewan komisaris (BOARDSIZE)

Ukuran dewan komisaris diukur dengan jumlah keseluruhan direksi dalam dewan komisaris.

3.3.3 Komite Audit, Komite kompensasi dan nominasi, mayoritas dilakukan oleh direksi independen (INDEPCOM)

Jika Komite audit komite kompensasi dan nominasi, mayoritas dilakukan oleh direksi independen, maka diberi kode : 1, dan Jika tidak maka diberi kode : 0.

3.3.4 Aktifitas Dewan komisaris dan Komite Audit

Aktifitas Dewan komisaris dan Komite Audit diukur dengan jumlah pertemuan yang dilakukan selama tahun penelitian.

4.4 Variabel Kontrol

4.4.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan telah terbukti berkorelasi positif dengan tingkat pengungkapan dalam beberapa penelitian terdahulu. Perusahaan berskala besar akan mengungkapkan lebih banyak informasi baik yang diwajibkan maupun sukarela, dibandingkan perusahaan kecil (Cooke,1989;Meek,1995;Hossain; 1995;Camfferman dan Cooke,2002). Penelitian yang akan dilakukan, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma dari penjualan.

4.4.2 Leverage

Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan berusaha untuk menurunkan biaya *monitoring* dengan mengungkapkan informasi lebih banyak (Jensen dan Meckling,1976). Penelitian ini mengukur *leverage* dengan menghitung rasio antara nilai buku hutang dan total aktiva perusahaan sampel penelitian. Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian terdahulu bahwa terdapat korelasi

antara *leverage* dan pengungkapan sukarela (Depoers,2000;Eng dan Mak,2003, M.Allegrini dan G.Greco,2010).

4.4.3 Rasio Profitabilitas

Penelitian ini mengukur profitabilitas dengan rasio *profit* dan aktiva (ROA). Hasil penelitian terdahulu membuktikan bahwa terdapat korelasi positif antara ROA dan pengungkapan sukarela (Raffournier 1995; Meek et al. 1995; Ahmed and Courtis 1999; Ho and Wong 2001; Camfferman and Cooke 2002; M Allegrini dan G.Greco,2010). Perusahaan yang berkinerja baik akan cenderung meningkatkan pengungkapan sukarela, sehingga terdapat korelasi antara ROA dan tingkat pengungkapan sukarela (M Allegrini dan G.Greco,2010)

4.5 Entry dan Pengolahan Data

Setelah data mengenai indeks pengungkapan sukarela dan data sekunder lainnya terkumpul, langkah selanjutnya adalah entry data ke dalam program *Microsoft excel* dan diolah datanya menggunakan program SPSS.

4.6 Analisis Data dan Pembuatan Laporan Penelitian

4.6.1 Analisis Statistika Deskriptif

Analisis Statistika deskriptif adalah Analisis metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensia dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan.

4.6.2 Analisis Statistika *Multivariate*

Analisis statistika *multivariate* adalah analisis statistika yang dikenakan pada data yang terdiri dari banyak variabel dan antar variabel saling berkorelasi. Kami menerapkan *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menguji hubungan antara pengungkapan sukarela dan variabel penjelas. Model dalam penelitian ini adalah :

$$DSCORE = \beta_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 ROA_i + \beta_4 INDI + \beta_5 L\ BOARDSIZE + \beta_6 INDEPCOM_i + \beta_7 BOARDMEET_i + \beta_8 ACMEET + e_i$$

Keterangan variabel

DSCORE : Disclosure score; dihitung dengan rasio jumlah item yang diungkapkan dengan maksimum skor yang dapat diperoleh.

SIZE : Ukuran perusahaan, yang diukur sebagai logaritma dari keseluruhan penjualan

Lev(leverage) : diukur dengan nilai buku total hutang dibandingkan dengan jumlah aktiva pada akhir tahun 2009.

ROA : Return On Asset

IND : Proporsi direktur independen pada total jumlah direksi.

BOARDSIZE : Total jumlah dewan komisaris

INDEPCOM . : Audit, Komite kompensasi dan nominasi, mayoritas dilakukan oleh direksi independen

BOARDMEET:Jumlah pertemuan dewan komisaris.

ACMEET :Jumlah pertemuan komite audit.

Analisis dapat dilakukan dengan melihat hasil pengolahan data menggunakan SPSS. Analisis mengacu pada hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

.7. Indikator Pencapaian Target Penelitian

Target penelitian diindikasikan tercapai apabila tujuan penelitian ini terpenuhi. Tujuan Penelitian ini adalah analisis hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan sukarela yang melibatkan 5 variabel tata kelola perusahaan. Variabel tersebut adalah Komposisi Dewan komisaris (*IND*), Ukuran Dewan komisaris (*BOARDSIZE*), Komite Audit, Komite kompensasi dan nominasi, mayoritas dilakukan oleh direksi independen(*INDEPCOM*), Aktifitas Dewan komisaris dan Aktifitas Komite Audit. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi artikel dalam jurnal ilmiah.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Analisis Statistik deskriptif

Statistik deskriptif untuk semua variabel dilaporkan dalam Tabel 5.1. Perusahaan yang digunakan untuk sampel penelitian adalah sebanyak 172 perusahaan manufaktur yang *listed* di BEI. Rata-rata persentase pengungkapan sukarela adalah 36% dengan berbagai variasi dari minimal 10% sampai maksimal 75%. Persentase rata-rata direktur independen dalam dewan komisaris adalah 38. Hanya 45 perusahaan dari 172 memiliki dewan komisaris disusun oleh mayoritas direktur independen. Hanya 27 perusahaan (15,69%) memiliki komite audit, komite kompensasi dan nominasi, mayoritas terdiri dari direktur independen. Sebenarnya, sebagian besar perusahaan tidak memiliki komite nominasi, sedangkan komite audit telah biasa ditetapkan.

Tabel 1 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Continuous and count variables	Mean	median	Min	Max	Standar deviation
DSCORE	0.36	0.33	0.12	0.75	0.14
SIZE	2.13	312.00	4.00	77.16	8.41
LEV	0.51	0.52	0.03	0.84	0.17
ROA	0.02	0.02	-0.24	0.12	0.05
IND	0.26	0.26	0.00	0.77	0.15
BOARDSIZE	9.47	9.00	6.00	19.00	3.00
BOARDMEET	8.18	7.00	2.00	25.00	3.54
ACMEET	4.28	4.00	1.00	14.00	2.54
Dichotomous variables (1,0)	Yes% (1)	No% (0)			
INDEPCOM	9.40				

5.2 Analisis multivariat

Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square (OLS) untuk menguji hubungan antara pengungkapan sukarela dan variabel penjelas. Model Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$DSCORE = \beta_0 + \beta_1 SIZE_i + \beta_2 LEV_i + \beta_3 ROA_i + \beta_4 IND_i + \beta_5 L$$
$$BOARDSIZE + \beta_6 INDEPCOM_i + \beta_7 BOARDMEET_i + \beta_8 ACMEET + e_i$$

Keterangan variabel :

i = perusahaan (n = 172)

DSCORE : Skor pengungkapan, dihitung sebagai rasio total item yang diungkapkan pada jumlah maksimum item yang dapat diungkapkan.

SIZE : ukuran perusahaan, dihitung sebagai log dari total aktiva

LEV : leverage, dihitung dengan $\frac{\text{total book value of debt}}{\text{total aktiva}}$ pada akhir tahun 2009

ROA : Return on Asset

IND : proporsi direktur independent terhadap jumlah dewan komisaris

INDEPCOM : variable dummy, jika terdapat komite audit, kompensasi dan nominasi yang mayoritas terdiri dari direktur independent diberi angka 1, jika tidak diberi angka 0

BOARDMEET : jumlah pertemuan dewan komisaris dalam tahun 2009

ACMEET : jumlah pertemuan komite audit dalam tahun 2009

Tabel 5.2 Hasil Regresi OLS

	Hypothesis	Expected sign	Coeff.	t-statistic
Conts			-0.1867**	-2.112
SIZE			0.0277***	3.955
LEV			-0.073	-1.400
ROA			0.1111	0.606
IND	HP1	+	0.0322	0.646
BOARDSIZE	HP2	+	0.0065**	2.011
INDEPCOM	HP3	+	-0.0016	-0.072
BOARDMEET	HP4a	+	0.0033**	2.053
ACMEET	HP4b	+	0.0095***	2.628
<i>F-statistics</i>	9.0644			
<i>p-value for F-test</i>	<0.0000			
Adjusted R ²	0.405			
Max VIF	2.884			

ALL p- value are two-tailed

*** Coefficient is significant at the 0.01 level (two-tailed)

** Coefficient is significant at the 0.05 level (two-tailed)

* Coefficient is significant at the 0.10 level (two-tailed)

Koefisien regresi model 1 dapat dilihat pada tabel 5.2. adjusted R² dari model 1 adalah 40,5%, F-value adalah 9,0644. Hal tersebut menunjukkan bahwa model 1 mempunyai *good explanatory power*.

Skor VIF (the variance inflation factor) dihitung untuk setiap variable independen, untuk mengevaluasi adanya multikolinieritas skor VIF yang lebih besar dari 10, mengindikasikan adanya masalah multikolinieritas (Gujarati, 2004) Skor VIF paling tinggi adalah 2,884.

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan White's and Breuch-Pagan's heterocedasticity test. Setelah dilakukan tes dihasilkan model 1 tidak terdapat heterokedastisitas. Hasil dapat dilihat di tabel 5.2.

Proporsi direktur independent terhadap jumlah direktur di dewan komisaris, adanya komite audit, kompensasi dan nominasi (INDEP COM) tidak signifikan berkorelasi dengan jumlah informasi yang diungkapkan sehingga HP₁, HP₃ tidak terbukti.

Jumlah dewan komisaris (*BOARD SIZE*) dan jumlah pertemuan menunjukkan korelasi yang positif dengan jumlah pengungkapan sukarela. Koefisien *BOARDSIZE* dan *BOARDMEET*

signifikan pada tingkat 5% ($p\text{-value} < 0,05$ two tailed). Frekuensi pertemuan komite audit berkorelasi positif, dengan pengungkapan sukarela ($p\text{-value} < 0,01$). Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa HP_2 , HP_{4a} dan HP_{4b} terbukti.

Bukti empiris ditemukan dalam penelitian adalah *monitoring* internal dan eksternal dapat mengurangi konflik keagenanan (*agency conflict*) dan asimetri informasi diantara pemegang saham ketekunan (*diligence*) komite audit dan dewan komisaris berhubungan positif dengan pengungkapan sukarela.

Fama dan Yensen (1983) menyatakan bahwa perusahaan dengan asimetri informasi yang tinggi, akan cenderung mendapatkan informasi dari direktur independen. Terkait dengan frekuensi pertemuan dewan komisaris, tidak ada jaminan bahwa dewan komisaris memberikan supervisi yang baik selama pertemuan. Sehingga frekuensi pertemuan bukan proksi yang sempurna untuk efektifitas aktifitas pemantauan.

Perusahaan dengan jumlah direksi yang banyak lebih transparan menyajikan informasi pada pemegang saham. Dalam konteks ini, jumlah dewan komisaris yang banyak dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi konflik keagenanan diantara tipe pemegang saham (Di Pietra Eral 2008; Larmau dan Vafeas 2010). Kontribusi dewan komisaris adalah dengan memberikan pemegang saham minoritas kesempatan representasi dan meningkatkan kontrol lingkungan (Laksmna, 2008).

Diantara variable kontrol, hanya ukuran perusahaan menunjukkan koefisien signifikansi positif. Penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan leverage tidak signifikan berkorelasi dengan pengungkapan sukarela. Frekuensi pertemuan audit berkorelasi positif dengan pengungkapan proyek dan informasi resiko. Informasi ini sangat berguna untuk membantu pemegang saham *outsider* untuk menilai investasi dan mengambil keputusan.

Ukuran perusahaan berkorelasi positif dengan informasi tentang strategi dan *sustainability*. Jumlah dewan komisaris yang banyak dapat memberikan representasi kepemilikan dan lebih terbuka tentang objektif strategi. Secara keseluruhan hasil penelitian ini mendukung pendapat bahwa tata kelola dan pengungkapan dalam setting keagenan dengan adanya pemegang saham mayoritas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini meregresikan indeks pengungkapan sukarela dengan lima variabel tata kelola (*corporate governance*) dan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, *leverage* dan profitabilitas. Variabel tata kelola perusahaan meliputi struktur dan fungsi dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris dan ketekunan (*diligence*) berhubungan positif dengan pengungkapan sukarela frekuensi pertemuan audit juga menunjukkan pengaruh positif terhadap jumlah informasi sukarela yang diungkapkan.

Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang hubungan antara mekanisme kontrol yang berbeda dalam setting keagenan dengan karakteristik adanya pemegang saham mayoritas. Bukti empiris menunjukkan bahwa pemantauan dewan komisaris dan pengungkapan sukarela, mengurangi konflik keagenan dan asimetri informasi. Hal tersebut terjadi diantara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Pengendalian keputusan berasosiasi dengan transparansi informasi terhadap pihak di luar perusahaan. Karena adanya mekanisme control dapat menurunkan insentif untuk mengatur dan membatasi pemegang saham minoritas untuk mendapatkan informasi.

Hasil penelitian menarik bagi pembuat kebijakan dan peraturan. Selanjutnya hasil tersebut dapat mendukung pernyataan untuk memperluas persyaratan pengungkapan setelah memperluas pengungkapan, kemungkinan untuk mengambil keuntungan privat pemegang saham mayoritas dapat dibatasi dengan demikian konflik keagenan dan asimetri informasi akan berkurang..

6.2 Saran

Bukti empiris menemukan bahwa ketika pengungkapan itu wajib perusahaan masih mencari peluang untuk melaporkan informasi sesuai keinginan mereka (Onen dan Jaggi, 2000; Chavent et al, 2006). Penelitian yang akan datang selanjutnya seharusnya dapat mengeksplor

hubungan antara tata kelola dan *mandatory report*. Penelitian selanjutnya harus dapat menggambarkan hubungan antara pengungkapan dengan peranan dewan komisaris, latar belakang dan keahliannya, dan menggunakan data yang longitudinal. Selain itu penelitian yang selanjutnya diharapkan dapat mengukur skor pengungkapan sukarela secara kualitas.

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu :

- 1 Penelitian ini hanya menggunakan data 1 tahun.
- 2 Penelitian ini hanya berfokus pada kuantitas pengungkapan sukarela yang diungkapkan, bukan kualitas pengungkapan sukarela
- 3 Penetapan skor pengungkapan sukarela merupakan penilaian subjektif peneliti

Secara keseluruhan penelitian ini konsisten dengan teori agensi, yaitu terdapat hubungan antara tata kelola perusahaan dan pengungkapan. Hasil penelitian mendukung pandangan adanya alat kontrol dapat mengurangi insentif pemegang saham mayoritas untuk mengontrol pemegang saham lainnya. Selanjutnya penelitian ini juga dapat mendorong pemerintah untuk memperluas pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, K., & Nicholls, D. (1994). The impact of non-financial company characteristics on mandatory disclosure compliance in developing countries: The case of Bangladesh. *The International Journal of Accounting*, 29(1), 62–77.
- Ajinkya, B., Bhojraj, S., & Sengupta, P. (2005). The association between outside directors, institutional investors and the properties of management earnings forecasts. *Journal of Accounting Research*, 43(3), 343–375.
- Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M., & Yao, L. (2009). Corporate governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian listed firms. *Journal of Applied Management Accounting Research*, 7(1), 1–21.
- Botosan, C. A. (1997). Disclosure level and the cost of capital. *The Accounting Review*, 72(3), 323–349.
- Cadbury Committee Report. (1992). Report of the Cadbury committee on the financial aspects of corporate governance. London: Gee.
- Chen, C. J. P., & Jaggi, B. (2000). Association between independent non-executive directors, family control and financial disclosures in Hong Kong. *Journal of Accounting and Public Policy*, 19(2), 285–310.
- Cheng, E. C. M., & Courtenay, S. M. (2006). Board composition, regulatory regime and voluntary disclosure. *The International Journal of Accounting*, 41, 262–289.
- Chhaochharia, V., & Grinstein, Y. (2007). The changing structure of US corporate boards: 1997–2003. *Corporate Governance*, 15(6), 1215–1223.
- Claessens, S., Djankov, S., Fan, J., & Lang, L. (1999). Expropriation of minority shareholders: Evidence
- Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2008). Boards: Does one size fit at all? *Journal of Financial Economics*, 87, 329–356.
- Collier, P., & Gregory, A. (1999). Audit committee activity and agency costs. *Journal of Accounting and Public Policy*, 18, 311–332.
- Conyon, M. J., & Peck, S. I. (1998). Board control, remuneration committees, and top management compensation. *Academy of Management Journal*, 41(2), 146–157.
- Cooke, T. E. (1989a). Disclosure in the corporate annual reports of Swedish companies. *Accounting and Business Research*, 19(2), 113–122.

- Cooke, T. E. (1989b). Voluntary corporate disclosure by Swedish companies. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 1(2), 171–195.
- Cronbach, L. (1951). Coefficient alpha and internal structure of tests. *Psychometrika*, 16, 297–334.
- Dalton, D. R., Daily, C. M., Johnson, J. L., & Ellstrand, A. E. (1998). Meta-analytic reviews of board composition, leadership structure, and financial performance. *Strategic Management Journal*, 19, 269–290.
- Dalton, C. M., & Dalton, D. R. (2005). Boards of directors: Utilizing empirical evidence in developing practical prescriptions. *British Journal of Management*, 16, S91–S97.
- Darrough, M. N., & Stoughton, N. M. (1990). Financial disclosure policy in an entry game. *Journal of Accounting and Economics*, 12, 219–243.
- DeAngelo, H., & DeAngelo, L. (2000). Controlling stockholders and the disciplinary role of corporate payout policy: A study of the Times Mirror Company. *Journal of Financial Economics*, 56(2), 153–207.
- Fama, E., & Jensen, M. (1983). Separation of ownership and control. *Journal of Law and Economics*, 26, 301–326.
- Gujarati, D. N. (2004). *Basic econometrics*. Boston: McGraw-Hill.
- Healy, P. M., & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature. *Journal of Accounting and Economics*, 31, 405–440.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Laksmana, I. (2008). Corporate board governance and voluntary disclosure of executive compensation practices. *Contemporary Accounting Research*, 25(4), 1147–1182.
- Lambert, R. A. (2001). Contracting theory and accounting. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1), 3–87.
- Lang, M., & Lundholm, R. (1993). Cross-sectional determinants of analyst ratings of corporate disclosure. *Journal of Accounting Research*, 31(2), 246–271.
- Larmou, S., & Vafeas, N. (2010). The relation between board size and firm performance in firms with a history of poor operating performance. *Journal of Management and Governance*, 14, 61–85.

- Leftwich, R. W., Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1981). Voluntary corporate disclosure: The case of interim reporting. *Journal of Accounting Research*, 19(Suppl), 50–77.
- Leuz, C., & Oberholzer-Gee, F. (2006). Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia. *Journal of Financial Economics*, 81, 411–439.
- Leuz, C., & Wysocki, P. (2008). Economic consequences of financial reporting and disclosure regulation: A review and suggestions for future research, working paper.
- Li, J., Pike, R., & Haniffa, R. (2008). Intellectual capital disclosure and corporate governance structures in UK firms. *Accounting and Business Research*, 38(2), 137–159.
- Lim, S., Matolcsy, Z., & Chow, D. (2007). The association between board composition and different types of voluntary disclosure. *European Accounting Review*, 16(3), 555–583.
- Lipton, M., & Lorsch, J. W. (1992). A model proposal for improved corporate governance. *Business Lawyer*, 48(1), 59–77.
- Lynck, J. S., Netter, J. M., & Yang, T. (2008). The determinants of board structure. *Journal of Financial Economics*, 87, 308–328.
- Main, B. G. M., & Johnston, J. (1993). Remuneration committees and corporate governance. *Accounting and Business Research*, 23, 351–362.
- Mancinelli, L., & Ozkan, A. (2006). Ownership structure and dividend policy: Evidence from Italian firms. *The European Journal of Finance*, 12(3), 265–282.
- Marston, C. L., & Shrikes, P. J. (1991). The use of disclosure indices in accounting research: A review article. *The British Accounting Review*, 23(3), 195–210.
- McKinnon, J., & Dalimunthe, J. (1993). Voluntary disclosure of segment information by Australian diversified companies. *Accounting and Finance*, 33(1), 33–50.
- Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors influencing voluntary annual report disclosures by US and UK and continental European multinational corporations. *Journal of International Business Studies*, 26(3), 555–572.
- Mendez, C. F., & Garcia, R. A. (2007). The effects of ownership structure and board composition on the audit committee meeting frequency: Spanish evidence. *Corporate Governance*, 15(5), 909–922.
- Menon, K., & Williams, J. D. (1994). The use of audit committees for monitoring. *Journal of Accounting and Public Policy*, 13(2), 121–139.

CURRICULUM VITAE

Name : Aditya Septiani
Date / Place of Birth : September 24, 1979, Semarang
Citizenship : Indonesia
Mailing Adress : Jl. Gondang Barat I/ no 1
Semarang- Post Code 50275 , Indonesia
Email Adress : Hanifayza@gmail.com

Academic Degrees

SE (Bachelor in Economics) Diponegoro University, Semarang, Indonesia, 1997 – 2002.
MSi (Master of Science in Accounting) Diponegoro University, Semarang, Indonesia, 2004 - 2005

Professional Carrier

Young Lecturer, Faculty of Economics, Diponegoro University, 2008

Publication

Bachelor Thesis

Analysis of Quality Cost , Emperical Study on C.V. Artha Kayu Indonesia

Master of Science in Accounting Thesis

Influence Factors of Timeliness Financial Reporting on Emerging Capital Markets: Disclosure Theory Perspective.

Research

Performance Analysis of Companies in terms of the Implementation of Corporate Social Responsibility (2010)